

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Gambaran Umum Kabupaten Pati

2.1.1. Kondisi Geografis

Kabupaten Pati adalah salah satu kabupaten yang ada di wilayah administratif provinsi Jawa Tengah yang ada diujung utara Pulau Jawa. Letak Kabupaten Pati cukup strategis, yang mana dilewati oleh jalan nasional yang menghubungkan dengan kota-kota besar seperti Surabaya, Semarang, dan Jakarta. Letak astronomis Kabupaten Pati diantara $6^{\circ},25'$ – $7^{\circ},00'$ LS dan antara $110^{\circ},15'$ – $111^{\circ},15'$ BT. Luas Kabupaten Pati 150,368 Ha, yang mana terdiri dari 59.332 ha lahan sawah, dan 91.036 ha bukan lahan sawah. Lahan sawah merupakan lahan pertanian yang berpetak dengan dibatasi petang sawah (galeng), saluran untuk membendung atau menyalurkan air, tanpa memandang dari mana diperoleh status lahan tersebut (Badan Pusat Statistik (BPS), 2021).



Gambar 2.3 Gambaran Peta Geografis Kabupaten Pati

Sumber: Internet

Kabupaten Pati di sebelah utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Jepara dan Laut Jawa. Disebelah barat, berbatasan langsung dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara. Di sebelah selatan, berbatasan langsung dengan Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Blora. Dan di sebelah timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Rembang dan Laut Jawa.

2.1.2. Administratif

Terdapat 21 kecamatan, 401 Desa, dan 5 kelurahan, yang mana kecamatan terluas adalah Sukolilo seluas 15.874 Ha, dan kecamatan terkecil adalah Wedarijaksa seluas 4.085 Ha. Untuk lebih lengkap, berikut tabel yang menyatakan jumlah kecamatan, desa/kelurahan, dan luas wilayahnya.

No.	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jumlah desa/kelurahan	Luas	Persentase Luas Wilayah
				Total Area	
				(km ²)	
1.	Sukolilo	Sukolilo	16	158,74	10,56
2.	Kayen	Kayen	17	96,03	6,39
3.	Tambakromo	Tambakromo	18	72,47	4,82
4.	Winong	Winong	30	99,94	6,65
5.	Pucakwangi	Pucakwangi	20	122,83	8,17
6.	Jaken	Sumberarum	21	68,52	4,56
7.	Batangan	Batursari	18	50,66	3,37
8.	Juwana	Doropayung	29	55,93	3,72
9.	Jakenan	Jakenan	23	53,04	3,53
10.	Pati	Pati Kidul	24/5	42,49	2,28
11.	Gabus	Gabus	23	55,51	3,69
12.	Margorejo	Margorejo	18	61,81	4,11
13.	Gembong	Gembong	11	67,30	4,48
14.	Tlogowungu	Tlogorejo	15	94,46	6,28

15.	Wedarijaksa	Wedarijaksa	18	40,85	2,72
16.	Trangkil	Trangkil	16	42,84	2,85
17.	Margoyoso	Waturoyo	22	59,97	3,99
18.	Gunungwungkal	Gunungwungkal	15	61,80	4,11
19.	Cluwak	Plaosan	13	69,31	4,61
20.	Tayu	Tayu Wetan	21	47,59	3,16
21.	Dukuhseti	Alasdowo	12	81,59	3,43
	Kabupaten Pati	Pati Lor	401/5	1.503,68	100,00

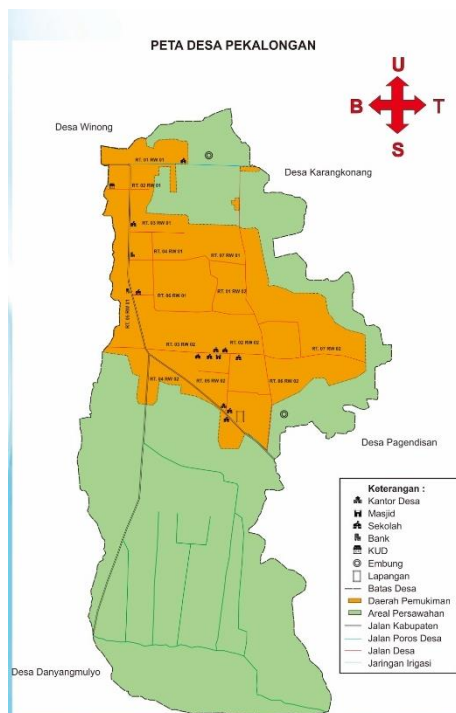
Tabel 2.2 Data Luas daerah Kabupaten Pati

Sumber: BPS 2021

2.1. Gambaran Desa Pekalongan

Desa Pekalongan merupakan desa yang masuk dalam Kecamatan Winong, Kabupaten Pati. Desa Winong berlokasi di bagian tenggara dari pusat Kota Pati. Dari ibukota Kabupaten untuk sampai ke Desa Pekalongan harus menempuh jarak sejauh 17 KM (BPS, 2021). Desa Pekalongan memiliki letak yang strategis sebab dekat dengan ibukota kecamatan. Desa Pekalongan menjadi pusat pendidikan di Kecamatan Winong, bahkan sering dijuluki Desa Pendidikan di wilayah Kabupaten Pati. Hal ini dikarenakan terdapat lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga tingkat atas, serta ditambah pondok pesantren. Desa Pekalongan memiliki slogan “BERSERI” yang memiliki kepanjangan bersih, sehat, dan mandiri. Warga Desa Pekalongan rajin bergotong royong serta peduli terhadap lingkungan. Hal itu dapat dibuktikan dengan ditetapkannya Desa Pekalongan sebagai ODF (Open Defecation Free), Juara 3 Inovasi Sampah tingkat Kabupaten Pati dan juara 2 PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) tingkat Kabupaten Pati.

Desa Pekalongan hanya memiliki satu dukuh, dua RW, dan 14 RT. Desa Pekalongan berada dikoordinat 06.8185 derajat LS dan 111.1064 derajat BT. Letak ketinggian Desa Pekalongan terukur 50.0 mdpl. Desa Pekalongan di sebelah utara berbatasan dengan Desa Winong. Di sebelah timur, berbatasan dengan Desa Karangkongon dan Pagendisan. Di sebelah selatan, berbatasan dengan Desa Kebolampang Dukuh Pekuk dan Desa Danyangmulyo. Dan di sebelah barat, berbatasan dengan Dukuh Pecangaan Desa Winong.



Gambar 2.4 Peta Desa Pekalongan

Sumber: Arsip Kantor Desa Pekalongan

No.	Pembagian Wilayah	Luas Wilayah (Ha)
1.	Kawasan Hunian	61,340
2.	Lahan Pertanian	134,630
3.	Lahan Lainnya	2,000
4.	Kolam Perikanan	0,5
5.	Embung	0,5
6.	Lapangan Olahraga	1
7.	Pemukaman	1
Total Luas Wilayah		198,970

Tabel 2.3 Pembagian Wilayah Desa Pekalongan

Sumber: Arsip Kantor Desa Pekalongan

Status yang disandang Desa Pekalongan dalam Indeks Desa Membangun adalah desa Maju pada tahun 2019. Hal ini terlihat dari nilai Indeks Desa Membangun Desa Pekalongan 0.8151. Indeks Desa Membangun adalah potret gambaran perkembangan kemandirian desa berdasar pada implementasi Undang–

undang Desa yang didukung dana desa dan pendampingan desa. Indeks Desa Membangun (IDM) mengarahkan ketepatan kebijakan dan campur tangan pembangunan oleh pemerintah dengan partisipasi masyarakat sesuai karakteristik wilayah desa yaitu tipologi dan modal sosial (Kemendes.go.id, 2020). Terdapat perangkat indikator yang telah dikembangkan dalam Indeks Desa Membangun (IDM) yang berdasarkan pada konsepsi bahwa untuk menuju desa maju serta mandiri, diperlukan kerangka pembanguna berkelanjutan yang mana aspek sosial, ekonomi, lingkungan/ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan mengembangkan potensi serta kemampuan deaa untuk menyejahterakan kehidupan Desa. Indeks Ketahanan Sosial (IKS) Desa Pekalongan menunjukkan angka 0.8286 pada tahun 2019. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) Desa Pekalongan 0.7500 pada tahun 2019. Dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan (IKL) Desa Pekalongan berada diangka 0.8667.

Desa Pekalongan pada tahun 2020 memiliki masing–masing satu kantor desa dan balai desa. Perangkat desa yang terdapat di Desa Pekalongan meliputi seorang kepala desa, seorang sekretaris desa, dan enam perangkat desa lainnya. Terdapat satu Kepala satuan Tugas (Satgas) dan Anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas) yang terdiri dari 17 pria. Terdapat dua tim penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Rukun Warga (PKK RW) dan 14 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Rukun Tetangga (PKK RT).

2.2. Kondisi Demografi Desa Pekalongan

2.2.1. Potensi SDM (Sumberdaya Manusia)

Menurut data Desa Pekalongan tahun 2020, jumlah penduduk Desa Pekalongan sebanyak 2.956 jiwa dengan 892 kepala keluarga. Gambaran kependudukan berdasarkan jenis kelamin disajikan sebagai berikut:

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)
1.	Laki-laki	1.486
2.	Perempuan	1.470
Total		2.956

Tabel 2.4 Komposisi penduduk Desa Pekalongan berdasarkan jenis kelamin

Sumber: Kantor Desa Pekalongan

2.3. Kondisi Sosial, Budaya, dan Pendidikan

Dalam konsep yang dikembangkan oleh Koentjaraningrat (1979) sistem sosial-budaya meliputi tujuh unsur yaitu; mata pencarian, sistem pengetahuan sistem teknologi dan peralatan, organisasi sosial, dan kemasyarakatan, religi dan upacara keagamaan, kesenian, serta bahasa (Kistanto, 2019). Desa Pekalongan merupakan desa agraris, meskipun berada di daerah pesisir Jawa bagian utara. Sebagian besar penduduk bermata pencarian sebagai petani dan pedagang. Di Desa Pekalongan terdapat satu swalayan, 36 warung kelontong, satu rumah makan, 25 kedai makanan, dua bank umum pemerintah, bank pengkreditan rakyat, tiga koperasi simpan pinjam (Arsip Kantor Desa Pekalongan, 2019).

Nasi Gandul menjadi salah satu ciri khas makanan Kabupaten Pati. Nasi gandum adalah hidangan nasi putih yang disajikan di atas daun pisang dengan kuah santan kental dengan citarasa gurih dan manis, ditambah potongan pilihan tambahan empal daging sapi, babat, atau telur bacem, dan sendok suru yang terbuat dari daun pisang.

Adapun potensi desa sangat penting dimiliki sebab hal tersebut dapat mendukung aktivitas ekonomi, sosial, budaya, serta kesatuan masyarakat sebagai modal dasar untuk memfasilitasi interaksi dan komunikasi diantara kelompok masyarakat. Potensi-potensi desa yang ada dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

2.3.1. Potensi Mata Pencarian Pokok

Jumlah penduduk berdasarkan mata pencarian, digambarkan melalui data berikut:

No.	Jenis pekerjaan	Jumlah (jiwa)
1.	Pegawai negeri Sipil (PNS)	145
2.	Swasta	2.811
Total		2.956

Tabel 2.5 Komposisi penduduk berdasarkan mata pencarian

Sumber: Kantor Desa Pekalongan

2.3.2. Potensi Lembaga Pendidikan

Sarana pendidikan yang dimiliki oleh Desa Pekalongan, disajikan dalam data berikut.

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah (buah)
1.	PAUD/KB	1
2.	TK/RA	2
3.	SD/MI	2
4.	SMP/MTs	2
5.	SMA/MA	3
6.	Pondok Pesantren	7
Total		17

Tabel 2.6 Jumlah sarana pendidikan di Desa Pekalongan

Sumber: Arsip Kantor Desa Pekalongan

2.3.3. Potensi Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan merupakan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.

No.	Nama Sarana	Jumlah (unit)
1.	Klinik Bersalin	5
2.	Praktik Dokter	2
3.	Posyandu	7
4.	Puskesmas	1
Total		15

Tabel 2.7 Sarana kesehatan di Desa Pekalongan

Sumber: Kantor Desa Pekalongan

2.3.4. Potensi Kelembagaan Desa Pekalongan

No.	Nama Lembaga Desa
1.	BUMDes (Badan Usaha Milik Desa)
2.	BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
3.	FKD (Forum Kesehatan Desa)
4.	Tim Penggerak PKK
5.	Karang Taruna
6.	LPMD
7.	LINMAS
8.	KPMD
9.	RT/RW
10.	SSB Putra Kencana
11.	Sanggar Seni Kencono Laras

Tabel 2.8 Potensi Kelembagaan Desa Pekalongan

Sumber: Arsip Kantor Desa Pekalongan

2.4. Gambaran Umum Program *Jogo Tonggo* Di Desa Pekalongan Kecamatan Winong Kabupaten Pati

Awal terbentuknya kebijakan ini merupakan bagian dari otonomi daerah yang membebaskan daerah administratif untuk melakukan percepatan penanganan dan pengendalian covid setelah mendapat keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non–alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid–19) Sebagai Bencana Nasional. Berdasarkan azas

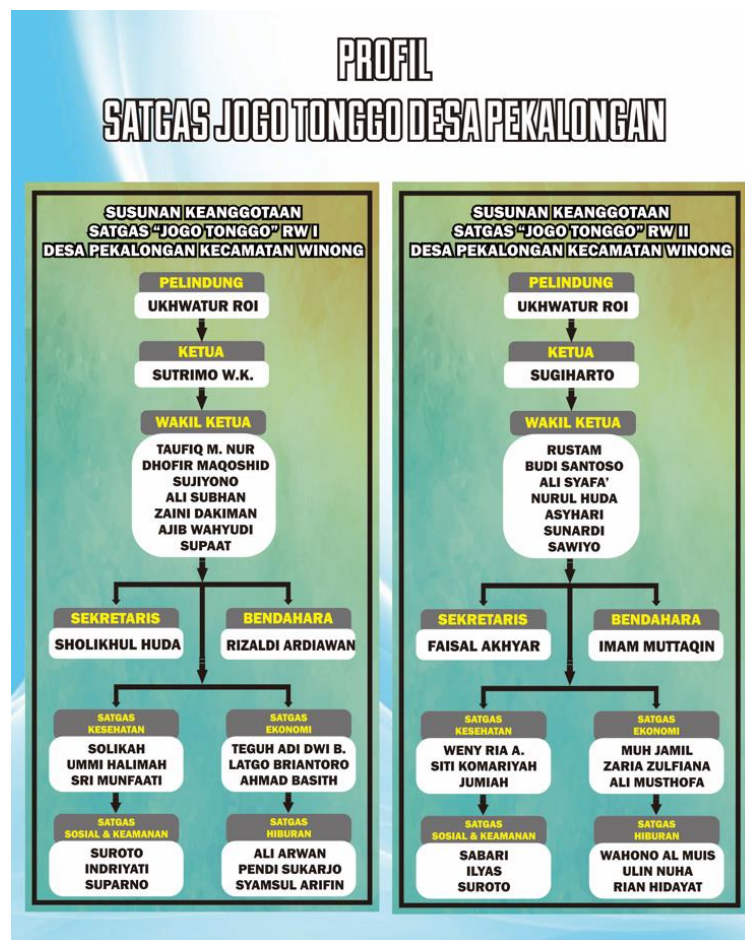
dekonsentrasi otonomi daerah, gubernur yang sebagai wakil dari pemerintah pusat di daerah yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan umum. Maka pada 22 April 2020, dikeluarkanlah Instruksi Gubernur Jawa Tengah Tentang Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Penanganan Covid-19 di Tingkat Rukun Warga (RW) Melalui Pembentukan “Satgas *Jogo Tonggo*”.

Pada saat program ini diimplemetasikan, Kabupaten Pati masih dipimpin oleh Bupati Haryanto dengan wakilnya Saiful Arifin. Dimasa kepemimpinan inilah Bupati Haryanto dan Saiful Arifin melaksanakan Instruksi Gubernur Nomor 1 Tahun 2020, dan memastikan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait percepatan penanganan Covid-19 bisa berjalan dengan baik.

Awal Program Jogo Tonggo dibentuk adalah seiring meningkatnya Covid-19 pada awal tahun 2020 lalu, dengan risiko tinggi penularan maka diperlukan penanganan untuk melawan Covid-19 secara bersama-sama melalui gerakan gotong royong. Masyarakat merupakan pihak yang berhadapan langsung dengan Covid-19, oleh karena itu masyarakat perlu diberdayakan dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 secara sistematis, terstruktur, dan menyeluruh melalui pembentukan “Satgas *Jogo Tonggo*”.

Satgas Jogo Tonggo merupakan satuan tugas menjaga tetangga untuk memastikan bahwa warga secara bergotong royong melawan penyebaran dan penularan Covid-19 di wilayah sekitar tempat tinggal mereka, sekaligus memastikan dukungan lain dari luar wilayah untuk melawan Covid-19 tepat sasaran. Satgas Jogo Tonggo bukan suatu organisasi yang dibentuk dari nol,

melainkan mengkonsolidasikan dan menyinergikan organisasi kemasyarakatan yang ada, seperti karang taruna, PKK, Dasa Wisma, Posyandu, dan warga di tingkat RW, dan juga lembaga atau organisasi diluar wilayah RW yang terkait melawan Covid-19.



Gambar 2.5 Struktur Organisasi Satgas Jogo Tonggo Desa Pekalongan

Sumber: Arsip Kantor Desa Pekalongan

Adapun tugas dari Satgas Jogo Tonggo bidang kesehatan:

1. Melakukan pendataan ODP / PDP / kasus terkonfirmasi;
2. Pemantauan dan penanganan terhadap pemudik;

3. Melakukan koordinasi dengan petugas kesehatan desa untuk layanan kesehatan;
4. Membagikan masker gratis;
5. Menyediakan tempat cuci tangan;
6. Memberikan imbauan kepada warga untuk tidak berkerumun, memakai masker, cuci tangan, dan melakukan penyemprotan disinfektan secara rutin;

Adapun tugas dari satgas Jogo Tonggo bidang ekonomi:

1. Mendorong warga untuk memanfaatkan pekarangan rumah untuk ditanami tumbuhan penyokong pangan;
2. Mendata kebutuhan dasar dan ketersediaan pangan seluruh warga melalui masing – masing RT;
3. Menyediakan lumbung pangan untuk pemenuhan kebutuhan dasar pangan kepada warga tidak mampu;
4. Menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga tidak mampu atau yang tidak memiliki pekerjaan; dan

Adapun tugas dari satgas Jogo Tonggo bidang sosial dan keamanan:

1. Pemantauan terhadap warung – warung sembako untuk memastikan ketersediaan bahan pokok makanan mencukupi;
2. Pemantauan terhadap poskamling di setiap RT agar selalu semangat dan aktif dalam kegiatan;
3. Penyaluran bantuan kepada warga tidak mampu atau warga yang terdampak Covid-19;

4. Melakukan kegiatan gotong royong bersih desa meskipun di tengah bencana Covid-19 dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
5. Melakukan pencatatan dan perlindungan terhadap warga yang beresiko tinggi (lansia, balita, ibu hamil, dan orang sakit);

Adapun tugas dari Satgas Jogo Tonggo bidang hiburan Desa Pekalongan adalah:

1. Melaksanakan pementasan hiburan.

Pandemi Covid-19 selain berpengaruh kepada bidang kesehatan, tetapi juga berpengaruh pada bidang ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. Menurunnya berbagai aktivitas berdampak pada kondisi sosial-ekonomi. Kenaikan harga barang yang diikuti dengan menurunnya penghasilan, menyebabkan terguncangnya daya beli masyarakat. Ditambah kebiasaan baru yang diterapkan dapat membuat jarak sosial antarindividu semakin jauh. Dampaknya, pemerintah perlu memperluas perlindungan sosialnya untuk membantu warga kurang mampu. Melihat situasi seperti itu, dengan potensi sumberdaya manusia yang ada perlu adanya pemberdayaan masyarakat untuk mencapai masyarakat yang mandiri dan tangguh untuk bangkit dari keterpurukan sosial – ekonomi. Dalam memberdayakan masyarakat tersebut mengedepankan kemanusiaan dan gotong royong.



Gambar 2.6 Prinsip Kerja Satgas Jogo Tonggo

Sumber: Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020

2.5. Sumber Dana

Sumber dana yang dialokasikan untuk program Jogo Tonggo adalah dana desa dan dengan ditambah swadaya masyarakat.

2.6. Fasilitator Kebijakan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) merupakan organisasi fasilitator dalam pelaksanaan Program Jogo Tonggo. Penetapan Dispermades sebagai fasilitator Program Jogo Tonggo, sebab Program Jogo Tonggo ini berdasar pada konsep pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut sesuai

dengan tujuan kebijakan ini dikeluarkan. Dalam struktur birokrasi Dispermades terdapat empat bidang tata kerja, sebagai berikut:

- 1) Bidang Pengembangan Desa, yang membawahi Seksi Administrasi dan Informasi Desa, serta Seksi Kerjasama Antardesa dan Pengembangan Kawasan Desa.
- 2) Bidang Pembangunan Desa, yang membawahi Seksi Pembangunan Desa, serta Seksi Pengembangan Sumberdaya Alam dan Penataan Lingkungan.
- 3) Bidang Pembinaan Kemsyarakatan Desa, yang membawahi Seksi Pembinaan Gotong Royong dan Kerukunan Masyarakat Desa, serta Seksi Pembinaan Lembaga Kesmasayarakatan Desa.
- 4) Bidang Pengembangan Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna, yang membawahi Seksi Pengembangan Lembaga Ekonomi dan Kelompok Masyarakat Desa, serta Seksi Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna.

2.7. Implementor Program Jogo Tonggo Di Desa Pekalongan

Implementor Program Jogo Tonggo merupakan konsolidasi dari organisasi masyarakat Desa Pekalongan sendiri yang telah disusun dalam struktur Jogo Tonggo sesuai Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2020.